

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan nasional yang selalu bertumpu pada kelompok usaha skala besar yang diharapkan menjadi generator pertumbuhan di masa sekarang ataupun di masa yang akan mendatang. Pembangunan nasional merupakan pembangunan masyarakat yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat di suatu negara. Indonesia sebagai negara yang sedang melangsungkan ekonomi, stabilitas keamanan, pemerataan hasil-hasil pembangunan, serta memberikan kesempatan yang sama bagi masyarakat untuk berkembang.

Pembangunan nasional sendiri dilaksanakan oleh masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan oleh pemerintah yang berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing serta menciptakan suasana yang menunjang, saling mengisi dan melengkapi pembangunan nasional serta berupaya untuk meningkatkan pertumbuhan.

Melihat perkembangan ekonomi dunia usaha yang sangat berkembang saat ini, menyebabkan penyedia dana seperti lembaga keuangann sangat dibutuhkan untuk kelangsungan usahanya. Lembaga bukan bank banyak yang bermunculan di berbagai daerah karena lembaga bukan bank tersebut dapat membantu memenuhi dana yang dibutuhkan masyarakat. Salah satu potensi yang perlu dikembangkan adalah sektor usaha kecil menengah. Kondisi ini mengharuskan baik usaha kecil maupun menengah melakukan upaya untuk menstabilkan atau

lebih meningkatkan usahanya. Suatu masalah yang menjadi penghambat adalah masalah permodalan usaha kecil dan menengah. Masalah ini mencakup aspek permodalan, masalah pembiayaan usaha, serta cara memanfaatkan fasilitas dalam rangka pelaksanaan usahanya.

Lembaga Keuangan Bukan Bank menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. KEP-38/MK/IV/1972, Pengertian Lembaga Keuangan Bukan Bank adalah semua lembaga atau badan yang melakukan aktivitas keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung mengimpun dana dari masyarakat dengan menerbitkan surat-surat berharga dan menyalurkan dana tersebut untuk membiayai investasi di berbagai perusahaan.

Lembaga Keuangan Bukan Bank mempunyai peranan penting dalam perekonomian suatu negara, termasuk Indonesia. Dengan adanya Lembaga Keuangan Bukan Bank, maka konsumsi domestik bergerak maju dan mendorong berkembangnya perekonomian. Adapun kegiatan Lembaga Keuangan Bukan Bank di Indonesia adalah sebagai berikut : (1). Menghimpun dana dari masyarakat dengan menerbitkan surat-surat berharga. (2). Memberikan fasilitas kredit kepada perusahaan swasta dan pemerintah, baik jangka pendek, menengah dan jangka panjang. (3). Berperan menjadi perantara bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia, dan menjadi bahan hukum pemerintah dalam pengadaan kredit dalam negeri maupun luar negeri. (4). Menyertakan modal perusahaan-perusahaan dan penjualan saham di pasar modal. (5).

Menjadi perantara bagi perusahaan dalam mendapatkan tenaga ahli di bidang finansial. (6). Melaksanakan kegiatan usaha lain di bidang keuangan atas persetujuan Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Dengan adanya sebuah lembaga yang dapat menjadi mediator antar pemilik kelebihan dana dan pihak yang memerlukan dana merupakan salah satu solusi dalam memecahkan masalah perekonomian rakyat tersebut. Dana ini yang akan digunakan untuk mengaktifkan ekonomi rakyat. Lembaga ekonomi yang dapat menjadi mediator kebutuhan dana bagi rakyat yang ingin mengembangkan ekonom rakyat atau sektor riil adalah lembaga keuangan mikro, salah satunya Lembaga Keuangan Mikro (LKM) oleh PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Persero.

PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) adalah perusahaan korporasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang merupakan lembaga keuangan bukan bank, dengan menyediakan jasa keuangan bagi usaha mikro kecil dan menengah, perorangan maupun badan usaha. PT. Permodalan Nasional Madani didirikan sebagai realisasi komitmen nyata pemerintah untuk mengembangkan, memajukan dan memelihara usaha mikro kecil dan menengah yang sebagai salah satu pilar penopang perekonomian Indonesia.

PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) sendiri memiliki dua program dalam menjalankan bisnisnya dengan tujuan untuk mensejahterakan ekonomi rakyat, yaitu (1) PNM ULaam (Unit Layanan Modal Mikro) merupakan layanan pinjaman modal untuk usaha mikro kecil dan bentuk terobosan bagi perseroan, karena

penyaluran pembiayaan dilakukan secara langsung, baik kepada perorangan maupun badan usaha. (2) PNM Mekaar (Membina Ekoonomi Keluarga Sejahtera) dimana program ditujukan untuk memberikan bantuan modal produktif kepada ibu-ibu prasejahtera secara berkelompok. Peningkatan pengelolaan keuangan untuk mengembangkan usahanya, mensejahterakan keluarga dengan cara pembiayaan modal usaha tanpa agunan.

Menurut (Kasmir, 2001:72) kata kredit bukan hal yang asing dalam masyarakat, tetapi merupakan istilah yang sangat populer, baik dikalangan masyarakat maupun badan usaha. Dalam istilah sehari-hari kata kredit sering diartikan memperoleh barang dengan membayar cicilan atau angsuran dikemudian hari atau memperoleh pinjaman uang yang pembayarannya dilakukann dikemudian hari dengan cicilan atau angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak.

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jjangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Kredit merupakan salah satu sumber penghasilan dan resiko bisnis yang terbesar. Oleh karena itu stabilnya perkembangan kredit dipengaruhi oleh keberhasilan pemberi kredit dalam mengelola perkreditan. Proses pemberian kredit membutuhkan pertimbangan dan analisis dari pihak manajemen kredit berdasarkan

peraturan masing-masing perusahaan.

Dalam persetujuan kredit, perusahaan harus melaksanakan prosedur pemberian kredit dengan baik yakni sesuai dengan SOP perusahaan. Jika perusahaan tidak melakukannya sesuai SOP maka akan menimbulkan besarnya piutang tak tertagih menjadi cukup besar dan piutang usaha menjadi piutang tak tertagih.

Prosedur dalam perkreditan dimulai dari adanya pengajuan permohonan kredit dari masyarakat atau badan usaha, proses analisis kredit, proses pencairan kredit sampai dengan proses umpan balik pelaksanaan kredit, konsep prosedur dan kebijakan kredit ini mengikuti alur proses kredit itu sendiri maka harus didukung dengan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit dan diharapkan tidak menimbulkan kredit bermasalah dikemudian hari.

Apabila perusahaan memiliki struktur yang sangat kompleks dan menyebar tetapi tidak memiliki suatu pengendalian yang baik, maka akan timbul berbagai kemungkinan. Salah satu kemungkinan yang akan timbul adalah kerugian perusahaan yang disebabkan oleh adanya penyelewengan-penyelewengan terhadap dokumen yang dilakukan oleh karyawan, ketidakefisien dalam beroperasi, kurangnya informasi dan ketidakcermatan karyawan dalam bekerja.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang akan dibahas dalam suatu skripsi dengan judul **“Analisis Prosedur Pemberian Kredit Modal Kerja pada PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Unit Rungkut**

Surabaya”

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah disampaikan diatas maka dapat di tarik pertanyaan sebagai berikut :

Bagaimana prosedur pemberian kredit modal kerja pada PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Unit Rungkut Surabaya ?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Sebagai salah satu perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. Untuk memenuhi kewajiban dalam menyelesaikan jenjang Strata Satu (S1) Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas PGRI Adi Buana Surabaya.
3. Untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teori yang diperoleh selama dibangku kuliah.

1.3.2 Tujuan Khusus

Mengetahui prosedur pemberian kredit modal kerja pada PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) jika dibandingkan dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) Perusahaan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang di harapkan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagi Peneliti
 - a. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan yang sangat penting bagi penulis dimasa yang akan datang.

- b. Untuk mengimplementasikan teori yang diperoleh pada perkuliahan dengan penerapan secara nyata di lapangan, yaitu perusahaan sehingga mampu melihat kondisi dunia usaha secara nyata.
 - c. Untuk mengetahui dan menguji dengan jelas bagaimana prosedur pemberian kredit di PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Unit Rungkut Surabaya.
 2. Bagi PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Unit Rungkut Surabaya
Dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan perusahaan dalam prosedur pemberian kredit yang telah diterapkan untuk meminimalisir adanya kredit bermasalah dikemudian hari.
 3. Bagi Universitas PGRI Adi Buana Surabaya
 - a. Untuk menambah referensi atau dokumentasi guna melengkapi perpustakaan apabila dibutuhkan suatu saat nanti.
 - b. Untuk menambah pembendaharaan literatur yang nantinya akan berguna bagi para mahasiswa sebagai studi perbandingan mencari dan otentik tentang masalah yang sama.
 - c. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan khususnya bagi lembaga pada program studi akuntansi.

1.5 Fokus Penelitian dan Keterbatasan

Fokus dalam penelitian ini adalah membahas tentang analisis prosedur pemberian kredit modal kerja pada PT. Permodalan Nasional Madani. Untuk membatasi

agar tidak melebar dari penelitian yang ditetapkan maka tempat, pelaku dan aktivitas menyesuaikan dengan waktu penelitian yang ditentukan sehingga jika ada fenomena, peristiwa yang mendukung namun tidak dapat diikuti sertakan dalam penelitian ini dapat dilakukan pada penelitian berikutnya.